

PENERAPAN PSAK 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BAGI YAYASAN PENDIDIKAN

Poly Endrayanto EC., SE., MM., Ak., CA
polychristmawan@yahoo.com
Universitas Respati Yogyakarta

ABSTRACT

Through Act No. 20 of 2003 on National Education System, the state has provided a clear framework to the Government in the implementation of national education in accordance with the mandate of Article 31 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The issue in this study is how the presentation, measurement and disclosure of financial transactions that occur on a foundation of education according to PSAK 45 on financial reporting nonprofit entity.

This research-based study of literature, aims to explain: the presentation, measurement and disclosure of financial transactions that occur on a foundation of education according to PSAK 45, so that the non-profit entity's financial statements can be more easily understood, relevance, and comparability. Results of this study are useful for the users of financial statements profit entities that have a common interest in order to assess: a. services rendered by the foundation of education and its ability to provide these services; b. how the manager or the board of trustees in carrying out its responsibilities and other aspects of their performance. For-profit entity's financial statements in accordance with PSAK 45 educational foundation consists of: (a) the statement of financial position (balance sheet) at the end of the reporting period (total assets, liabilities, and net assets); (b) the statement of activities and cash flows for a reporting period; (c) the notes to the financial statements.

Keywords: presentation, measurement, disclosure, financial reporting, nonprofit entities, educational foundations

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian

masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu Pasal 31 ayat (5) mengamanatkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya, organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan finansial, tetapi keuntungan-keuntungannya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi (Nickels, et al., 2009:8).

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya (PSAK No. 45, 2011:1).

Para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk

terus memberikan jasa tersebut, dan cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut (PSAK No. 45, 2011:2).

Berbagai sumber masukan dari Undang-Undang Pendidikan dan Yayasan, serta PSAK No. 45 memberikan dorongan bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aturan yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan oleh yayasan pendidikan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilihat beberapa masalah, yaitu bagaimana penyajian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan yang terjadi pada yayasan pendidikan menurut PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: Penyajian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan yang terjadi pada yayasan pendidikan menurut PSAK 45 tentang

pelaporan keuangan entitas nirlaba, sehingga diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah untuk dipahami, memiliki relevansi, dan daya banding.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan (*financial statements*) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, meliputi: manajer, investor, kreditor, dan agen regulator. Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan, seperti apakah akan melakukan investasi atau meminjamkan uang kepada perusahaan (Walter T. Harrison Jr., dkk., 2012:2).

Kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) meletakkan pondasi untuk memecahkan persoalan “besar” dalam akuntansi. *IFRS Framework for the Preparation of Presentation of Financial Statements* menggambarkan sifat, fungsi, dan batasan, dalam hal ini akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan beroperasi. *IFRS Framework* berfokus pada laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*), yang dibuat dan disajikan (setidaknya) setiap tahun serta ditujukan pada kebutuhan akan informasi umum mengenai berbagai pemakai laporan keuangan (Walter T. Harrison Jr., dkk., 2012:7).

IFRS Framework menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi banyak pemakai ketika membuat keputusan ekonomi. Pemakai akan mengevaluasi laporan keuangan untuk membuat keputusan seperti apakah akan melakukan investasi tambahan ke dalam entitas, menyediakan kredit dan pembiayaan, atau menilai kinerja manajemen (Walter T. Harrison Jr., dkk., 2012:8).

IFRS framework menggunakan istilah karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) untuk menggambarkan atribut yang membuat informasi yang tersedia dalam laporan keuangan bermanfaat bagi pemakai. Keempat karakteristik kualitatif yang utama adalah dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas. **Dapat Dipahami** berarti bahwa informasi akuntansi harus cukup transparan, sehingga masuk akal bagi pemakai informasi. **Relevansi**, agar menjadi relevan, informasi harus mampu menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki nilai prediktif atau umpan balik. **Reliabilitas**, informasi dianggap dapat diandalkan bila lengkap, bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, dan dapat diharapkan untuk merepresentasikan secara wajar substansi ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasarinya. **Komparabilitas**, para pemakai biasanya membandingkan laporan keuangan entitas selama suatu periode waktu untuk

mengidentifikasi tren dalam posisi dan kinerja keuangannya (Walter T. Harrison Jr., dkk., 2012:9-10).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) akuntabilitas; (b) transparansi; (c) nirlaba; (d) penjaminan mutu; dan (e) efektivitas dan efisiensi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: (a) memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau

lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau (b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Laporan keuangan Yayasan, wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan, disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Laporan posisi keuangan (neraca), termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Entitas nirlaba, umumnya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti: (a) kas dan setara kas; (b) piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; (c) persediaan; (d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka; (e) instrumen keuangan dan investasi jangka panjang; (f) tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kas atau aset lain

yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.

Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap: (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap: (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat

disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan Aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas menurut PSAK 45 adalah menyediakan informasi mengenai: (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk: (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan (c)

menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

Laporan Arus Kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 (revisi 2009). Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: (a) aktivitas

pendanaan, yaitu: penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi, bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang; (b) pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas adalah sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk entitas nirlaba sektor pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Wawan Sukmana, dan Yesi Gusman (2008:428), menyimpulkan bahwa kinerja yayasan yang mengelola perguruan tinggi swasta di Tasikmalayapun lebih baik setelah menyajikan laporan keuangannya berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan penerapan *Total Quality Management* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja yayasan.
2. David Hasibuan (2010:29), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara belum sesuai dengan laporan keuangan PSAK No. 45.
3. Luh ardiana, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), melakukan penelitian perlakuan akuntansi aktiva tetap pada yayasan dana punia singlaraja tahun 2013, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Yayasan Dana Punia tidak melakukan pencatatan secara benar sesuai dengan PSAK.
4. Mei Witria Ulfa, R. Anastasia Endang Susilawati, dan Abdul Halim (2014), berdasarkan wawancara dan bukti dokumen yang diperoleh kesimpulan bahwa: pelaporan akuntansi yang dilakukan di SMK Negeri 4 Malang hanya sebatas melaporkan jurnal umum yaitu mencatat kas masuk dan kas keluar.
5. Nikmatuniayah (2014:279), kesimpulan yang dapat disampaikan dalam program penerapan penyusunan laporan keuangan yaitu terbentuknya sistem penerimaan

donasi, sistem pengeluaran donasi, dan laporan keuangan publik yayasan.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk memahami: (a) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dan yayasan, (b) Bagaimana penyajian, pengukuran dan pengungkapan pelaporan keuangan bagi yayasan pendidikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan dan yayasan, pernyataan standar akuntansi keuangan, berbagai sumber data dari internet yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan bagi yayasan pendidikan, dan berbagai sumber data dari buku literatur.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan pendidikan, dan pengelolaan dana pendidikan.

Tanggung Jawab Pendanaan.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sumber Pendanaan Pendidikan.

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Dana Pendidikan.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pernyataan di atas, dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan: (a) bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas; dan (b) melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Keberadaan Yayasan dalam masyarakat untuk mencapai kegiatan, maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud, dan tujuannya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penyajian, Pengukuran dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan. Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menurut Indra Bastian (2007:74) adalah untuk

menyajikan informasi mengenai: (a) jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih suatu yayasan, (b) pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai serta sifat aktiva bersih, (c) jenis dan jumlah arus masuk serta arus keluar sumber daya selama satu periode dan hubungan di antara keduanya, (d) cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditasnya, (e) usaha jasa suatu yayasan.

Yayasan sebagai entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut, sehingga dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan.

Yayasan pendidikan sebagai entitas nirlaba dalam mendanai kebutuhan modalnya dapat bersumber dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Yayasan pendidikan sebagai entitas nirlaba

memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya.

Menurut PSAK No. 45 (2010:2) laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, (b) menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut, (c) tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK No. 45 (2010:3):

Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya

oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Laporan keuangan entitas nirlaba menurut PSAK 45 meliputi: (a) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, (b) laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan (c) catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan. Laporan posisi keuangan entitas nirlaba secara keseluruhan mencakup dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. **Klasifikasi Aset dan Liabilitas.** Laporan posisi keuangan (neraca), termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam

kelompok yang homogen, seperti: (a) kas dan setara kas; (b) piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; (c) persediaan; (d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka; (e) instrumen keuangan dan investasi jangka panjang; (f) tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut: (a) menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo; (b) mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang; (c) mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada/tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara

menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan/dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen/hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh

pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan Aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian. Laporan

aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah/pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi /nonoperasi, dapat dibelanjakan/tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi/belum direalisasi, berulan/tidak berulan.

Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa.

umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas-aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

Berikut ini disajikan contoh laporan keuangan untuk entitas nirlaba. Contoh ini disajikan untuk memberikan gambaran anatomis. Entitas nirlaba dianjurkan untuk menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, kreditur, dan pemakai laporan keuangan diluar entitas. Penyusunan laporan keuangan komparatif juga dianjurkan, namun untuk penyederhanaan contoh yang disajikan di bawah ini, laporan arus kas disajikan untuk satu periode.

Entitas Nirlaba
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20x2 dan 20x1
(dalam jutaan)
20x2 20x1

	20x2	20x1
Aset:		
Kas dan setara kas	Rp 188	Rp 1.150
Piutang bunga	5.325	4.175
Persediaan dan biaya dibayar di muka	1.525	2.500
Piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi Lancar	3.500	2.500
Properti investasi	13.025	11.400
Aset Tetap	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	545.175	508.750
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Aset	Rp730.550	Rp696.200
Liabilitas dan Aset Neto:		
utang dagang	Rp 6.425	Rp 2.625
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan		1.625
utang Lain-Lain	2.187	3.250
utang wesel		2.850
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
utang jangka panjang	13.750	16.250
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Liabilitas	Rp 26.575	Rp 30.850
Aset Neto:		
Tidak Terikat	Rp 288.070	Rp 259.175
Terikat temporer (Catatan B)	60.855	63.675
Terikat permanen (Catatan C)	355.055	342.500
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Aset Neto	Rp 703.975	Rp 665.350
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	Rp 730.550	Rp 696.200

Bentuk Informasi Kolom Tunggal

Entitas Nirlaba Laporan Aktivitas Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)	
Perubahan Aset Neto Tidak Terikat	
Pendapatan dan Penghasilan:	
Sumbangan	Rp 21.600
Jasa Layanan	13.500
Penghasilan investasi Jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E)	2.125
Lanjutan Laporan Aktivitas	
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	20.570
Lain-Lain	375
	<hr/>
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	72.170
Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):	
Pemenuhan program pembatasan	29.975
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	3.750
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125
	<hr/>
Jumlah aset yang telah berakhir pembatasannya	36.850
	<hr/>
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan lain	109.020
Beban dan Kerugian:	
Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	14.400
Manajemen dan umum	6.050
Pencarian dana	5.375
	<hr/>
Jumlah Beban (Catatan F)	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200
	<hr/>
Jumlah Beban dan Kerugian	80.125
	<hr/>
Kenaikan Jumlah Aset Neto Tidak Terikat	Rp 28.895
	<hr/>

Perubahan Aset Neto Terikat Temporer:	
Sumbangan	Rp 20.275
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	6.450
Penghasilan neto terealisasi dan belum panjang terealisasi dari investasi jangka (Catatan E)	7.380
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan	(75)
Aset neto terbebaskan dari pembatasan (Catatan D)	(36.850)
	<hr/>
Penurunan Aset Neto Terikat Temporer	(2.820)
Lanjutan Bentuk A	
Perubahan Dalam Aset Neto Terikat Permanen:	
Sumbangan	Rp 700
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	300
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	11.550
Kenaikan Aset Neto Terikat Permanen	12.550
Kenaikan Aset Neto	38.625
Aset Neto Pada Awal Tahun	665.350
	<hr/>
Aset Neto Pada Akhir Tahun	Rp 703.975

Laporan Arus Kas

Entitas Nirlaba Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)	
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:	
Kas dari pendapatan jasa	Rp. 13.050,00
Kas dari penyumbang	20.075,00
Kas dari piutang lain-lain	6.537,50
Bunga dan dividen yang diterima	21.425,00
Penerimaan lain-lain	375,00
Bunga yang dibayarkan	(955,00)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	(59.520,00)
Hutang lain-lain yang dilunasi	(1.063,50)
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	<hr/> (75,00) <hr/>
Aliran Kas dari Aktivitas Investasi:	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	625,00
Pembelian peralatan	3.750,00
Penerimaan dari penjualan investasi	190.250,00
Pembelian investasi	187.250,00
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	<hr/> (125,00) <hr/>

Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:	
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	
Investasi dalam endowment	500,00
Investasi dalam endowment berjangka	175,00
Investasi bangunan	3.025,00
Investasi perjanjian tahunan	<u>500,00</u>
	4.200,00
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	750,00
Pembayaran kewajiban tahunan	(363,00)
Pembayaran utang wesel	(2.850,00)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(2.500,00)
	<u>(4.962,50)</u>
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	<u>Rp (762,50)</u>
Kenaikan (Penurunan) neto dalam kas dan setara kas	<u>Rp (962,50)</u>
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>1.150,00</u>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u><u>187,50</u></u>
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Perubahan dalam aset neto	38.625,00
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	8.000,00
Kerugian akibat kebakaran	200,00
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	75,00
Kenaikan piutang bunga	(1.150,00)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	975,00
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(812,50)
Kenaikan dalam hutang dagang	3.800,00
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(1.625,00)
Penurunan dalam hutang lain-lain	(1.062,05)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(6.850,00)
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang	(750,00)
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	<u>(39.500,00)</u>
Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	<u>Rp (75,00)</u>
Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:	
Peralatan yang diterima sebagai hibah	Rp. 350,00
Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan	200,00

Catatan Atas Laporan Keuangan

Ilustrasi Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan Catatan B dan Catatan C wajib disajikan. Catatan D, E, dan F menyediakan

informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas nirlaba. Semua jumlah dalam ribuan rupiah.

Catatan A

Entitas menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai

sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

Catatan B

Aset neto terikat temporer untuk periode periode keuangan adalah sebagai berikut:

Aktivitas program A:

Pembelian peralatan	Rp 7.650
Penelitian	10.640
Seminar dan publikasi	3.800

Aktivitas program B:

Perbaikan kerusakan peralatan	5.600
Seminar dan publikasi	5.395

Aktivitas program C:

Umum	7.420
Bangunan dan peralatan	5.375
Perjanjian perwalian tahunan	7.125
untuk periode setelah 31 Desember, 19X1	<u>7.850</u>

Rp 60.855

Catatan C

Aset neto terikat permanen dibatasi untuk:

Investasi tahunan, penghasilannya
dibelanjakan untuk mendukung:

Aktivitas program A	Rp 68.810
Aktivitas program B	34.155
Aktivitas program C	34.155
Kegiatan lain entitas	<u>204.930</u>

	Rp 342.050
Dana yang penghasilannya untuk ditambahkan pada jumlah sumbangan awal hingga mencapai nilai	Rp 5.300
Polis asuransi kematian yang penerimaan ganti rugi asuransi atas kematian pihak yang diasuransikan tersedia untuk mendanai aktivitas umum	200
Tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi	7.500
	<u>Rp 355.050</u>

Catatan D

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan penyumbang melalui terjadinya beban tertentu atau terjadinya beban tertentu atau terjadinya kondisi yang diisyaratkan oleh penyumbang.

Tujuan pembatasan yang dicapai:

Beban program A	Rp 14.500
Beban program B	11.500
Beban program C	3.975
	<u>Rp. 29.975</u>

Peralatan untuk program A yang dibeli dan dimanfaatkan

Pembatasan waktu yang telah terpenuhi:

Jangka waktu yang telah dipenuhi	Rp 2.125
Kematian penyumbang tahunan	1.000
	<u>Rp 3.125</u>
	<u>Rp 36.850</u>

Catatan E

Investasi dicatat sebesar nilai pasar atau nilai appraisal, dan penghasilan (atau kerugian) yang telah terealisasi atau belum terealisasi dapat dilihat dari laporan aktivitas. Entitas menginvestasikan kelebihan kas di atas kebutuhan harian dalam investasi lancar. Pada tanggal 31 Desember 20X2, Rp1.400 diinvestasikan pada investasi lancar dan menghasilkan Rp 850 per tahun. Sebagian

besar investasi jangka panjang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok A adalah dana permanen dan tidak diwajibkan untuk menaikkan nilai bersihnya. Kelompok B adalah jumlah yang oleh badan perwalian ditujukan untuk investasi jangka panjang. Tabel berikut ini menunjukkan investasi jangka panjang entitas

	Kel A	Kel B	Lain-lain	Jumlah
Investasi awal tahun	410.000	82.000	16.750	508.750
Hibah tersedia untuk investasi:				
untuk dana permanen	500		200	700
untuk dana temporer			175	175
untuk dana perwalian tahunan			500	500
Jumlah yang ditarik untuk penyumbang tahunan yang meninggal			(1.000)	(1.000)
Kembalian investasi (neto, setelah dikurangi beban Rp375) Dividen, bunga, dan sewa	15.000	5.000	750	20.750
Penghasilan terealisasi dan belum terealisasi	30.000	9.500		39.500
Jumlah kembalian investasi	45.000	14.500	750	60.250
Jumlah tersedia untuk operasi tahun berjalan	(18.750)	(5.000)		(23.750)
Penghasilan dana perwalian untuk tahun berjalan dan masa depan			(450.00)	(450.00)
Investasi akhir tahun	436.750	90.000	16.925	545.175

Komponen dalam setiap kelompok investasi dan kepemilikan investasi lain-lain pada tanggal 31 Desember 20X2 disajikan dalam tabel berikut ini.

	Kel A	Kel B	Lain-lain	Jumlah
Aset neto terikat permanen	Rp 342.050	-	5.500	347.550
Aset neto terikat temporer	26.880	-	11.425	38.305
Aset neto tidak terikat	67.820	91.500	-	159.320
	Rp 436.600	90.000	16.925	545.175

Badan perwalian menerapkan peraturan yang mensyaratkan dana *endowment* permanen dinilasi sebesar nilai nyata atau daya beli, kecuali penyumbang secara eksplisit menyatakan penggunaan apresiasi neto yang yang disyaratkan. Untuk memenuhi tujuan dana, manajemen menetapkan bahwa apresiasi neto dipertahankan secara permanen sebesar jumlah yang diperlukan sesuai untuk menyesuaikan nilai mata uang historis dana

sumbangan dengan menggunakan indeks harga konsumen. Setiap kelebihan di atas dana abadi permanen dapat digunakan untuk tujuan lain yang telah digunakan. Pada tahun 20X2, total kembalian investasi kelompok A adalah Rp18.000 (10,6 persen), dan dari jumlah tersebut Rp4.620 ditahan secara permanen untuk mempertahankan nilai nyata sumbangan tersebut. Sisanya sebesar Rp13.380 tersedia untuk tujuan lain yang

telah ditentukan oleh dewan perwalian.

Catatan f

Beban yang terjadi, seperti pada tabel di bawah ini.

	Total	Program			Manajemen & umum	Pencarian Dana
		A	B	C		
Gaji, upah	Rp 37.787,50	18.500,00	9.750,00	4.312,50	2.825,00	2.400,00
Biaya lain-lain	11.875,00	5.187,50	1.875,00	4.312,50		
Supplies dan perjalanan	7.887,50	2.162,50	2.500,00	1.225,00	600,00	1.400,00
Biaya jasa dan Profesiona	17.100,00	400,00	3.725,00	1.500,00	500,00	975,00
Kantor dan pekerjaan	6.320,00	2.900,00	1.500,00	1.125,00	545,00	250,00
Depresiasi	8.000,00	3.600,00	2.000,00	1.425,00	625,00	350,00
Bunga	955,00				955,00	
Jumlah Beban	Rp79.925,00	32.750,00	21.350,00	14.400,00	6.050,00	5.375,00

KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan bahwa: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai

pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan **prinsip keterbukaan dan akuntabilitas**.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan entitas nirlaba bagi yayasan

pendidikan memiliki kepentingan bersama untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh yayasan pendidikan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer atau pengurus yayasan pendidikan dalam melaksanakan tanggung jawab dan kinerja mereka.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor dan pihak lainnya untuk: mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer/pengurus yayasan pendidikan. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan, (3) catatan atas laporan keuangan.

SARAN

Standar akuntansi keuangan menurut PSAK 45 sebaiknya “diaplikasikan” oleh yayasan pendidikan, karena merupakan standar bagi pembuatan laporan keuangan dan alat ukur kinerja yayasan. Yayasan pendidikan

sebaiknya membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45, agar laporan keuangan yayasan dapat dipahami, relevan, reliabel, dan dapat diperbandingkan untuk memenuhi kepentingan bagi para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Yayasan pendidikan dalam membuat laporan keuangan sebaiknya sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 45), agar laporan keuangannya: (a) dapat dipahami, artinya bahwa informasi akuntansi harus transparan, sehingga masuk akal bagi pemakai informasi; (b) relevan, artinya informasi harus mampu menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki nilai prediktif atau umpan balik; (c) reliabel, artinya informasi dianggap dapat diandalkan bila lengkap, bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, dan dapat diharapkan untuk merepresentasikan secara wajar substansi ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasarinya; (d) dapat diperbandingkan, artinya para pemakai biasanya membandingkan laporan keuangan yayasan selama suatu periode waktu untuk mengidentifikasi tren dalam posisi dan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

David Hasibuan. *Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara Dalam Kaitannya Dengan*

- Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan (PSAK No. 45 Application at Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara in Relation to Financial Statement Information)*. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 12, April 2010.
- Harrison Jr., Walter T., Horngren Charles T., Thomas, William C., dan Suwardi, Themin. 2012. *Akuntansi Keuangan (International Financial Reporting Standards-IFRS)*. Bahasa Indonesia language edition published by Penerbit Erlangga.
- Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Luh Ardiana, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan. *Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Yayasan Dana Punia Singaraja Tahun 2013*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2 No: 1 Tahun 2014.
- Mei Witria Ulfa, R. Anastasia Endang Susilawati, dan Abdul Halim. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Smk Negeri 4 Malang)*. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume: 02, Nomor: 01, April 2014.
- Nikmatuniayah. 2014. *Penerapan Teknologi Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Dan Psak 45 IAI Pada Yayasan Daruttaqwa Kota Semarang*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora.
- Nickels, William G., McHugh, James M., McHugh, Susan M. 2009. *Pengantar Bisnis – Understanding Business*. Buku 1. Edisi Kedelapan. Jakarta, Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Laporan Arus Kas, Revisi 2009*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 Instrumen Keuangan: Penyajian, 2010*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen
keempat.

Wawan Sukmana, dan Yesi Gusman. *Pengaruh
Penyajian Laporan Keuangan*

*Berdasarkan Psak No. 45 Tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi
Nirlaba Dan Penerapan Total Quality
Management Terhadap Kinerja
Yayasan (Survei Pada Yayasan Yang
Mengelola Perguruan Tinggi Swasta
Di Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi FE
Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008.*